



Implementasi Aplikasi SILOBA Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Di Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Sofie Rosalin Sayidina¹, Chandra Hendriyani², Tengku Sitti Rochmah³

^{1,2,3}Program Studi Sekretari, Universitas Taruna Bakti

¹2303018@tbu.ac.id, ²chandra.hendriyani@tbu.ac.id, ³sitti.rochmah@tbu.ac.id

Abstrak

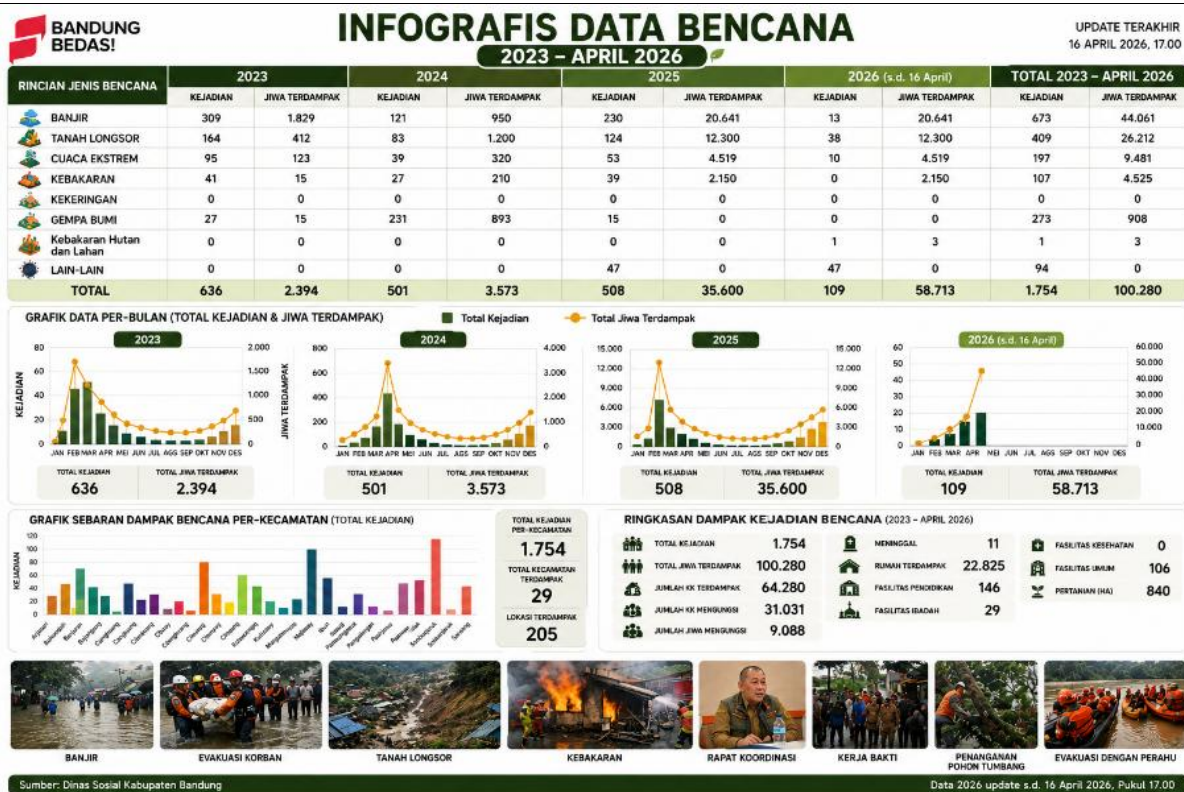
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SILOBA sebagai digitalisasi proses pendataan korban bencana dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara dan dokumentasi terhadap proses pendataan korban bencana sebelum dan sesudah implementasi aplikasi SILOBA. Sebelum digitalisasi, proses pendataan masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan, ketidaksinkronan data, duplikasi data dan rendahnya efektivitas dalam penyaluran bantuan. Implementasi aplikasi SILOBA meliputi proses *input* data, verifikasi korban, pengelolaan logistik, sampai distribusi bantuan dalam satu platform digital berbasis *real-time*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SILOBA dapat meningkatkan kualitas layanan publik berdasarkan dimensi *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy* sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan kecepatan, akurasi data, transparansi proses, serta ketepatan distribusi bantuan kepada korban bencana. Aplikasi SILOBA berperan dalam mendukung layanan publik berbasis data yang lebih efektif, akurat, dan responsif. Namun demikian, dalam implementasi sistem masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur jaringan internet yang belum stabil. Oleh karena itu, upaya perbaikan diperlukan untuk mendukung optimalisasi sistem yang berkelanjutan.

Kata kunci: Aplikasi, SILOBA, Korban Bencana, Kualitas Layanan, Dinas Sosial

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi karena secara geografis terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, serta berada pada kawasan *Ring of Fire*. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, dan tanah longsor (Djalante et al., 2017; Meilianda et al., 2020). Selain itu, letak Indonesia di wilayah tropis dengan curah hujan tinggi turut meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim (Aldrian & Susanto, 2003; Ward et al., 2021). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor yang menyumbang lebih dari 70% kejadian bencana setiap tahunnya (BNPB, 2023). Pengelolaan data korban bencana menjadi elemen strategis bagi pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Namun, di tingkat daerah masih terdapat kendala berupa keterlambatan pelaporan, ketidaksinkronan data, dan rendahnya integrasi antarinstansi, yang berdampak pada belum optimalnya kualitas layanan publik, khususnya dalam ketepatan distribusi bantuan sosial (Mergel et al., 2021; Wirtz & Müller, 2022).

Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, kepadatan penduduk, serta tingginya curah hujan. Kabupaten Bandung sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat juga termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi geografis berupa daerah pegunungan, curah hujan tinggi, serta alih fungsi lahan menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana (Rusfiana & Lestari, 2021).



Gambar 1. Infografis Data Bencana

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2026

Berdasarkan data bencana Kabupaten Bandung Tahun 2023–2026 pada Gambar 1, banjir dan tanah longsor merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi dan berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat terdampak bencana. Dalam setiap kejadian bencana, pendataan korban menjadi aspek penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyaluran bantuan secara cepat dan tepat. Ketersediaan data yang akurat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas pelayanan publik, khususnya dalam distribusi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana. Namun, pada tingkat daerah masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan pelaporan, ketidaksinkronan data, rendahnya integrasi antarinstansi, serta duplikasi data korban yang berdampak pada belum optimalnya kualitas layanan publik (Mergel et al., 2021; Wirtz & Müller, 2022).

Pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung ditemukan juga masih kurang optimalnya kualitas layanan akibat proses pendataan korban bencana yang masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel sehingga proses pendataan menjadi kurang efektif karena seluruh data harus *diinput* dan diperbarui secara manual. Selain itu, sistem ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta ketidaktepatan dalam distribusi bantuan kepada korban bencana. Ariansyah et al. (2025) menyatakan bahwa sistem pendataan manual dalam penanganan korban bencana dapat menyebabkan ketidaksinkronan data dan menurunkan efektivitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem manual belum mampu mendukung kebutuhan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya transformasi digital dalam pelayanan publik melalui penerapan sistem informasi berbasis aplikasi. Transformasi digital merupakan proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, efektivitas kerja, dan kualitas pelayanan publik (Setiowati et al., 2026). Menurut Sulastris dan Methasari (2025), transformasi digital di sektor publik mampu meningkatkan produktivitas organisasi serta mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, digitalisasi memungkinkan proses pengelolaan data dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data driven decision making*) (Dwivedi et al., 2023). Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya berfungsi sebagai perubahan teknologi, tetapi juga sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih efektif, transparan, dan responsif.

Seiring dengan perkembangan digitalisasi pelayanan publik, sistem informasi manajemen memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan data dan pelayanan secara terintegrasi. Indrawan et al. (2024) menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengintegrasikan manusia, teknologi, dan prosedur untuk

mengolah data menjadi informasi yang mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan organisasi. Dalam penanganan bencana, penggunaan sistem informasi berbasis digital dapat meningkatkan efektivitas pelayanan melalui pengelolaan data yang lebih cepat, terstruktur, dan akurat (Setyawan et al., 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi sistem informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Haryanto et al. (2022) menjelaskan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis *website* dalam pendataan korban bencana mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data dan mempermudah proses pelaporan. Selain itu, Tangi et al. (2021) menyatakan bahwa transformasi digital dalam sektor publik dapat meningkatkan efisiensi pelayanan melalui integrasi sistem informasi dan pengelolaan data secara *real-time*. Penelitian lain oleh Setyawan et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi dalam pelayanan publik mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, penelitian mengenai digitalisasi pendataan korban bencana yang secara khusus mengkaji integrasi sistem pendataan, verifikasi korban, pengelolaan logistik, dan distribusi bantuan dalam peningkatan kualitas layanan publik masih terbatas.

Dalam konteks pelayanan publik, kualitas layanan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hasifah (2025) menyatakan bahwa kualitas layanan merupakan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Kualitas layanan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan pelayanan, tetapi juga mencakup ketepatan informasi, transparansi, dan kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Untuk mengukur kualitas layanan tersebut, penelitian ini menggunakan dimensi *SERVQUAL* yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy* (Tarigan, 2025). Model *SERVQUAL* digunakan karena mampu mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna layanan terhadap aspek fasilitas, keandalan pelayanan, kecepatan respons, jaminan pelayanan, serta kepedulian terhadap masyarakat.

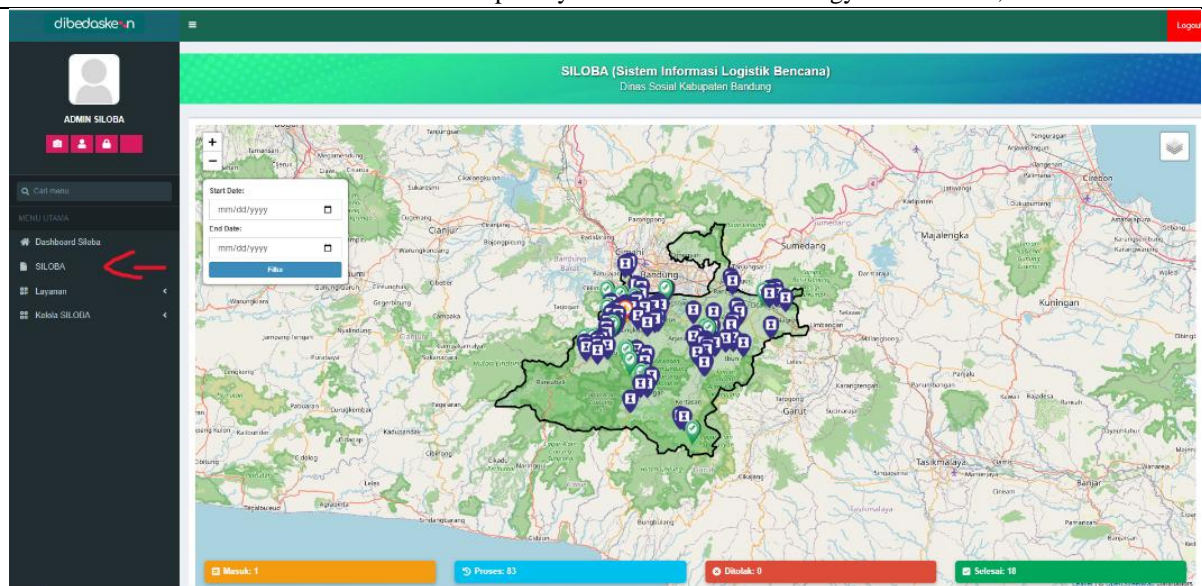
Sebagai upaya meningkatkan kualitas pendataan korban bencana, Dinas Sosial Kabupaten Bandung mengimplementasikan aplikasi SILOBA (Sistem Informasi Logistik Bencana) sebagai sistem pendataan digital yang terintegrasi. Aplikasi ini mendukung proses *input* data, verifikasi korban, pengelolaan logistik, hingga distribusi bantuan secara *real-time*. Meskipun demikian, implementasi aplikasi SILOBA masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem dan infrastruktur jaringan internet yang belum stabil sehingga penggunaannya belum optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi aplikasi SILOBA dalam pendataan korban bencana serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model digitalisasi pendataan korban bencana berbasis SILOBA yang mengintegrasikan aspek teknologi, administrasi, dan pelayanan publik secara terstruktur sebagai upaya mewujudkan layanan publik berbasis data (*data driven public service*).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi aplikasi SILOBA dalam pendataan korban bencana serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai proses penggunaan sistem digital, kendala yang dihadapi, serta perubahan pelayanan setelah penerapan aplikasi SILOBA. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pendataan korban bencana dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana. Fokus penelitian diarahkan pada proses digitalisasi pendataan korban bencana melalui aplikasi SILOBA, mulai dari proses *input* data, verifikasi korban, pengelolaan logistik, hingga distribusi bantuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada petugas yang terlibat dalam pengelolaan data korban bencana menggunakan aplikasi SILOBA untuk memperoleh informasi mengenai proses pendataan, pelaksanaan verifikasi data, pengelolaan bantuan, serta kendala dalam implementasi sistem. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung berupa tampilan *dashboard* aplikasi SILOBA, proses verifikasi data korban, pengelolaan logistik bantuan, serta dokumen pendataan korban sebelum digitalisasi yang masih menggunakan Microsoft Excel.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebelum mengimplementasikan aplikasi SILOBA, proses pendataan korban bencana di Dinas Sosial Kabupaten Bandung masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.

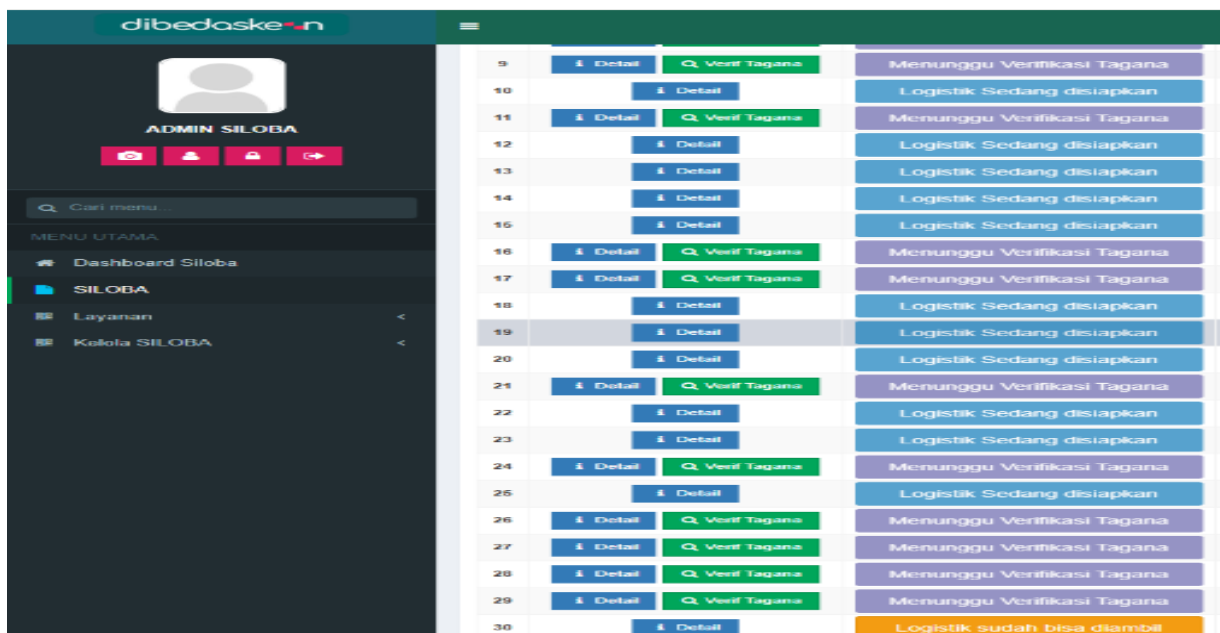


Gambar 3. Tampilan *Dashboard* SILOBA (Sistem Informasi Logistik Bencana)

Sumber: SILOBA Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2026

Implementasi aplikasi SILOBA menunjukkan adanya transformasi digital dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan. Setiowati et al. (2026) menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Sejalan dengan itu, Sulastrri dan Methasari (2025) menyatakan bahwa transformasi digital dalam sektor publik mampu meningkatkan produktivitas organisasi serta mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Proses pendataan dalam aplikasi SILOBA dimulai dari *penginputan* data permohonan bantuan oleh petugas. Selanjutnya, data tersebut masuk ke tahap verifikasi oleh relawan TAGANA (Taruna Siaga Bencana). Pada tahap verifikasi, sistem menampilkan status permohonan sebagai “sedang diverifikasi” dan dilengkapi dokumentasi foto sebagai bukti kondisi di lapangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.



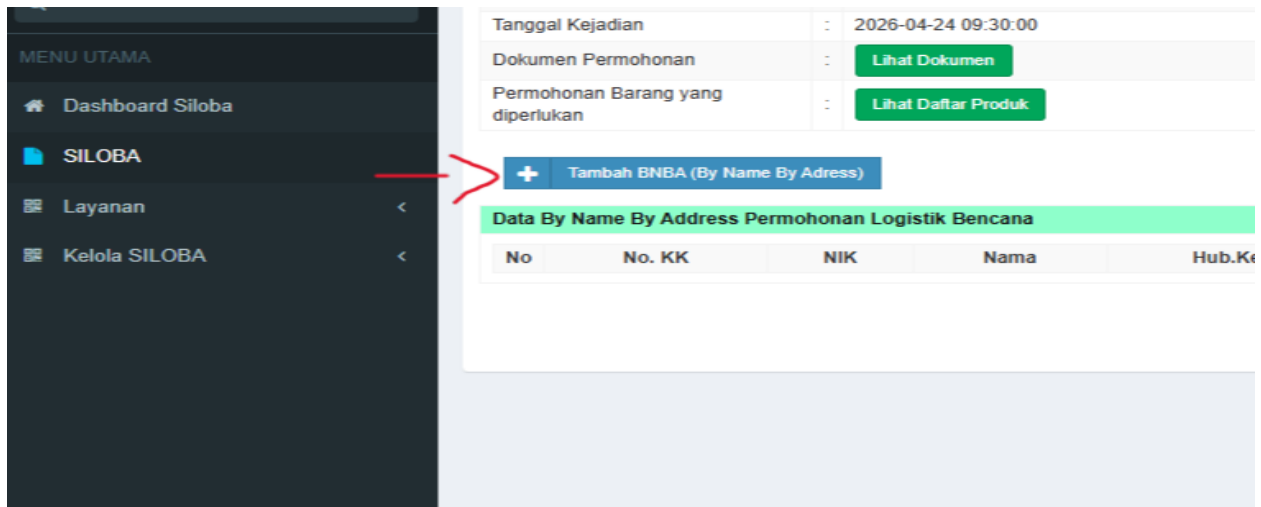
Gambar 4. Proses Verifikasi Data Korban dalam Aplikasi SILOBA

Sumber: SILOBA Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2026

Tahap ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data korban sebelum diproses lebih lanjut. Tahapan verifikasi menunjukkan bahwa sistem digital tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga sebagai

instrumen pengendalian informasi agar data yang digunakan lebih valid dan akurat. Menurut Murniasih et al. (2025), sistem digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data serta meminimalkan kesalahan pencatatan melalui integrasi informasi secara *real-time*.

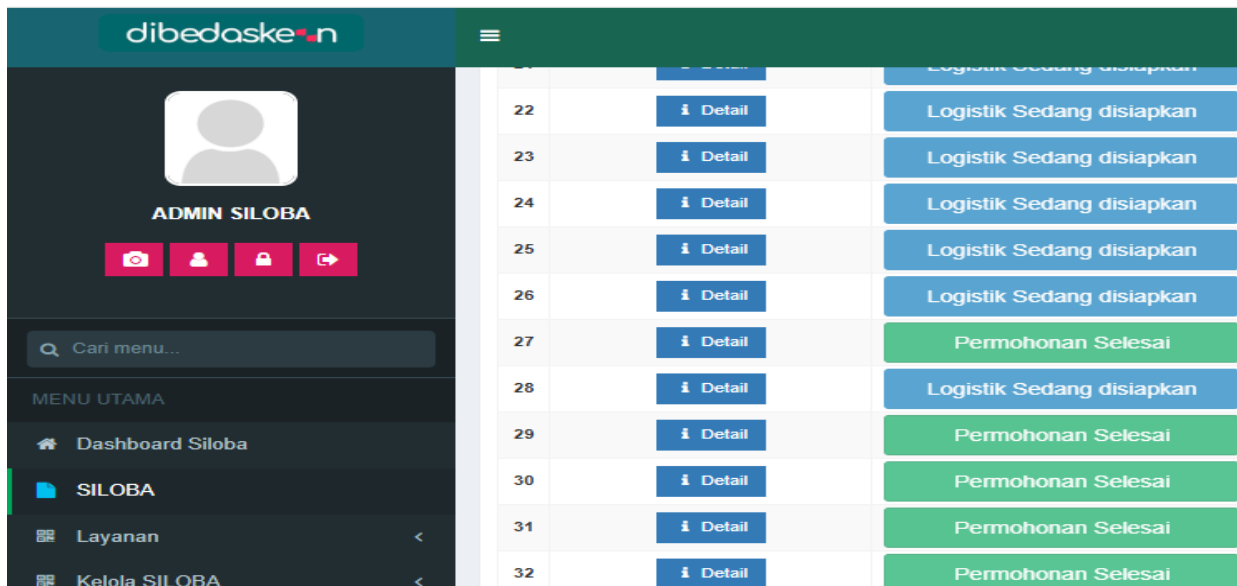
Setelah proses verifikasi selesai, status permohonan berubah menjadi “logistik sedang disiapkan”. Pada tahap ini, petugas menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan dengan menambahkan daftar barang melalui sistem sebagaimana terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Pengelolaan Kebutuhan Logistik Dalam SILOBA

Sumber: SILOBA Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2026

Tahap selanjutnya adalah proses distribusi bantuan, di mana status berubah menjadi bantuan dapat diambil setelah dokumen pendukung berupa berita acara diunggah sebagai bukti penerimaan bantuan. Tahap ini menunjukkan adanya sistem kontrol yang jelas dalam penyaluran bantuan. Setelah seluruh proses selesai, status permohonan berubah menjadi selesai, yang menandakan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan secara lengkap sebagaimana terlihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Status Penyelesaian Permohonan Bantuan

Sumber: SILOBA Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2026

Secara keseluruhan, implementasi aplikasi SILOBA menunjukkan bahwa digitalisasi pendataan korban bencana mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung ketepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Sistem tersebut menunjukkan adanya alur pelayanan yang terintegrasi, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Penerapan aplikasi SILOBA juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pendataan dan penyaluran bantuan kepada

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9109>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

korban bencana. Dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya, aplikasi SILOBA mampu mempercepat proses pendataan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah pemantauan pelayanan secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan dianalisis menggunakan dimensi *SERVQUAL* yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Model *SERVQUAL* digunakan untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan (Tarigan, 2025). Pada aspek *tangibles*, aplikasi SILOBA menyediakan fasilitas digital berupa *dashboard*, sistem verifikasi, dan pengelolaan data berbasis aplikasi yang mendukung proses pelayanan menjadi lebih modern dan terstruktur. Keberadaan fasilitas digital tersebut menunjukkan adanya peningkatan sarana pelayanan dalam mendukung proses pendataan dan distribusi bantuan kepada korban bencana.

Pada aspek *reliability*, aplikasi SILOBA meningkatkan keandalan pelayanan melalui proses verifikasi data dan pencatatan yang terstruktur sehingga mampu meminimalkan kesalahan dan duplikasi data korban. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digital mampu meningkatkan ketepatan informasi dan konsistensi pelayanan kepada masyarakat. Dalam aspek *responsiveness*, aplikasi SILOBA memungkinkan petugas memberikan respons lebih cepat karena data dapat diakses secara *real-time*. Kondisi ini mendukung proses pengambilan keputusan dan distribusi bantuan menjadi lebih cepat dibandingkan sistem manual sebelumnya.

Selanjutnya, pada aspek *assurance*, sistem memberikan kejelasan informasi mengenai status permohonan bantuan pada setiap tahapan sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Transparansi informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Sementara itu, pada aspek *empathy*, distribusi bantuan menjadi lebih tepat sasaran karena didasarkan pada data korban yang telah diverifikasi. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat lebih diperhatikan sesuai kondisi di lapangan.

Meskipun demikian, implementasi aplikasi SILOBA masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem serta infrastruktur jaringan internet yang belum stabil. Selain itu, masih ditemukan gangguan teknis pada sistem yang menyebabkan proses *input* dan pembaruan data terkadang mengalami hambatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai agar sistem dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi aplikasi SILOBA membentuk digitalisasi pendataan korban bencana yang terintegrasi melalui tahapan *input* data, verifikasi korban, pengelolaan logistik, dan distribusi bantuan dalam satu platform digital yang terstruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, akurat, transparan, dan berbasis data.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi aplikasi SILOBA di Dinas Sosial Kabupaten Bandung mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan kepada korban bencana. Sebelum penerapan aplikasi SILOBA, proses pendataan masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan, ketidaksinkronan data, duplikasi data korban, dan kurang optimalnya distribusi bantuan. Implementasi aplikasi SILOBA menghadirkan sistem pendataan yang terintegrasi melalui tahapan *input* data, verifikasi korban, pengelolaan logistik, hingga distribusi bantuan berbasis *real-time*. Berdasarkan dimensi *SERVQUAL*, implementasi aplikasi SILOBA meningkatkan kualitas pelayanan publik pada aspek *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy* melalui peningkatan kecepatan pelayanan, akurasi data, transparansi proses, serta ketepatan distribusi bantuan. Meskipun demikian, implementasi aplikasi SILOBA masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, gangguan teknis, serta infrastruktur jaringan internet yang belum stabil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi serta penguatan infrastruktur teknologi guna mendukung optimalisasi sistem secara berkelanjutan.

Reference

- Aldrian, E., & Susanto, R. D. (2003). Identification Of Three Dominant Rainfall Regions Within Indonesia And Their Relationship To Sea Surface Temperature. *International Journal Of Climatology*, 23(12). <https://doi.org/10.1002/Joc.950>
- Ariansyah, D., Sagita, M., Julia, R. A., & Sarmila. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos Kepada Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 394–404.
- Bencana, B. N. P. (2023). Data Informasi Bencana Indonesia Tahun 2023. In BNPB.
- Djalante, R., Garschagen, M., Thomalla, F., & Shaw, R. (2017). Disaster Risk Reduction In Indonesia: Progress, Challenges, And Issues.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9109>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Dwivedi, Y. K., Hughes, L., & Baabdullah, A. M. (2023). Multidisciplinary Perspectives On Opportunities, Challenges, And Implications Of Generative Conversational AI For Research, Practice, And Policy. *International Journal Of Information Management*, 71, 102642.
- Haryanto, D., Saputra Elsi, Z. R., Perdana, M. W., & Jimmei, J. (2022). Perancangan Sistem Informasi Pendataan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial Di Dinas Sosial Kota Palembang Berbasis Website. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 13(3). <https://doi.org/10.36982/Jiig.V13i3.2689>
- Hasifah, N. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Layanan Kesehatan. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 10(1), 321–326.
- Indrawan, A. K., Amerieska, S., & Putra, I. L. (2024). Sistem Informasi Manajemen Publik.
- Meilianda, E., Surjono, S. S., Abubakar, Y., & Usman, T. (2020). Disaster Risk Assessment In Indonesia: A Review. *IOP Conference Series: Earth And Environmental Science*, 273(1), 12042.
- Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. B. (2021). Agile: A New Way Of Governing. *Public Administration Review*, 81(1), 161–165. <https://doi.org/10.1111/Puar.13202>
- Murniasih, I., Zulhamdani, Z., & Basri, A. (2025). Transformasi Digital Sistem Informasi Apotek Qilah Sehat Menggunakan Model Kesuksesan Delone And Mclean. *Nusantara Hasana Journal*, 5(2), 655–671.
- Rusfiana, Y., & Lestari, M. N. (2021). Strategi Antisipasi Potensi Bencana Alam Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Konstituen*, 3(1), 31–39.
- Setiowati, D., Indriani, D., Wisartika, I., & Fitriyani, S. A. (2026). Analisis Strategis Dampak Transformasi Digital Indonesia: Studi Literatur Pada Sektor Publik, Ekonomi, Dan Pendidikan. *SITEKNIK: Sistem Informasi, Teknik Dan Teknologi Terapan*, 3(1), 22–31.
- Setyawan, A., Rochim, A. I., & Kusbandrijo, B. (2022). Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Jawa Timur. *Maret*, 2(02), 43–51.
- Sulastri, S., & Methasari, M. (2025). Transformasi Digital Dalam Manajemen SDM Serta Dampaknya Terhadap Produktivitas Dan Kepuasan Pegawai. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*.
- Tangi, L., Janssen, M., Benedetti, M., & Noci, G. (2021). Digital Government Transformation: A Structural Equation Modelling Analysis Of Driving And Impeding Factors. *International Journal Of Information Management*, 60, 102356.
- Tarigan, G. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Dengan Metode SERVQUAL Pada Sistem Pelayanan Publik. *Jurnal Teknologi Informasi*, 9(2), 2105–2110.
- Ward, P. J., Marfai, M. A., Yulianto, F., Hizbaron, D. R., & Aerts, J. C. J. H. (2021). Coastal Inundation And Flooding In Indonesia Due To Climate Change. *Nature Climate Change*, 11(5), 1–7.
- Wirtz, B. W., & Müller, W. M. (2022). An Integrated Artificial Intelligence Framework For Public Management. *Public Management Review*, 24(7). <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1928621>